

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah industri perjudian sangat erat dengan nama Makau dan akan menjadi nama pertama yang muncul dalam benak. Makau SAR atau Makau adalah yuridiksi administrasi khusus Tiongkok selepas kependudukan Portugis dari abad ke-16 hingga tahun 1887. Makau juga kerap dikenal sebagai ibu kota judi dunia adalah salah satu wilayah judi terbesar di dunia dan terbesar di Asia. Makau memiliki sekitar 49 kasino dan 58 hotel kasino yang aktif berdiri dan menjadi kota judi yang paling berkontribusi bagi perindustrian judi global (Hassan, 2023).

Beberapa kasino terkenal yang ada di Makau mencakup The Venetian Macao, City of Dreams, Wynn Palace, Grand Lisboa, dan MGM Cotai. Dikutip dari Reuters (2023) pendapatan Makau dapat mencapai 1.98 miliar USD pada bulan Mei 2023 dan mengalahkan Las Vegas. Selain itu, dikutip dari Kempinski (2025) pada Agustus 2025 Makau telah mendapatkan setidaknya 2,72 miliar USD. Dengan pencapaian ini, Makau akhirnya dijuluki sebagai ibu kota judi dunia karena besarnya pendapatan Makau dari perjudian sekaligus menjadi pemasukan terbesar Makau.

Jauh sebelum Makau mendapatkan gelar ibu kota judi dunia, Makau ternyata bukan merupakan pusat perjudian di masa lalunya. Pada masa pemerintahan Dinasti Song, Makau sebenarnya adalah pulau tidak berpenghuni. Kemudian imigran suku Hoklo mulai menempati Makau dan berdagang,

menjadikan Makau wilayah yang berpotensi sebagai pusat perdagangan. Setelah kedatangan bangsa Portugis di tanah Makau, wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah pelabuhan transit yang digunakan oleh pedagang Portugis dari tahun 1516. Setelah lama menempati Makau, Tiongkok kemudian mengizinkan Portugis untuk menetap di Makau. Portugis kemudian membangun Makau sebagai pos perdagangan yang awalnya hanya digunakan untuk transit perdagangan Jepang-Tiongkok yang kemudian Portugis harus menjadi ‘kurir’ perdagangan tersebut setelah larangan dagang langsung antara dua negara tersebut (US Department of State 2001).

Di saat yang bersamaan dengan Makau yang berkembang sebagai pelabuhan yang menghasilkan, perjudian di Makau juga berkembang yang dimulai pada saat Makau masih menjadi wilayah kekuasaan milik dinasti Ming pada tahun 1368-1644 (Willis 2002, 13). Kala itu pedagang dari Tiongkok daratan menjelajahi wilayah lain untuk berdagang rempah-rempah. Tetapi dalam kasus di Makau, pedagang-pedagang itu juga menyalurkan hobinya yaitu berjudi. Karena pada saat itu tidak ada regulasi, permainan judi dijalankan oleh pekerja bank dan dilakukan di pinggir jalan.

Setelah diserahkannya Hong Kong kepada Inggris pada tahun 1842 oleh Tiongkok, Hong Kong kemudian menjadi lokasi pelabuhan strategis dan mengalahkan Makau yang akhirnya menyebabkan Makau kehilangan salah satu pendapatannya. Gubernur yang menjabat kala itu bersama dengan pemerintahan Portugis kemudian melegalkan praktik perjudian pertama kali pada tahun 1947 untuk mengisi kas pemerintahan yang kosong. Selain dari itu, Portugis mencium

keuntungan besar dari sektor perjudian. Dengan rampungnya legalisasi perjudian Makau oleh pemerintah Portugis, maka rumah judi di Makau perlu membayar sewa kepada pemerintah Portugis sebagai bentuk pajak (Kallo 2022). Hingga pada tahun 1950, Makau sudah memiliki 200 kios judi bank Tiongkok atau yang disebut dengan *Fan Tan*. Hingga pada abad ke-19, perjudian telah menjadi satu komoditas dan pendapatan utama pemerintahan Makau dan mendapatkan julukan “Monte Carlo dari Timur” (Akshay 2025; Direcção de Inspeccão e Coordenação de Jogos, t.t.).

Pada tahun 1961, pemerintah Makau menaikkan pajak judi setelah satu-satunya penguasa *franchise* kasino Makau, Fu Laorong, meninggal dunia. Gubernur Marques—yang saat itu menjabat di Makau—melelang operasi judi melalui penawaran umum yang diatur dalam Surat Keputusan Legislatif No. 1496 (Direcção de Inspeccão e Coordenação de Jogos, t.t.). Stanley Ho, warga negara Hong Kong yang terbang ke Makau setelah invasi Jepang ke pemerintahan Inggris di Hong Kong, mengajukan banding untuk membeli *franchise* kasino. Setelah meminta pertolongan dari pebisnis Hong Kong, Henry Fok Ying-tung, Stanley berhasil membeli monopoli kasino seharga 410 juta HKD (Hing 2005, 209–210).

Kembalinya Makau ke Tiongkok setelah kependudukan Portugis menandakan akhir dari ‘kekuasaan’ 40 tahun Stanley Ho. Judi yang dulunya dimonopoli oleh satu perusahaan kemudian oleh pemerintah Makau di bawah pemerintahan Tiongkok diliberalisasi. Ini artinya Makau secara resmi membuka pintunya bagi investor asing untuk berinvestasi. Hal tersebut juga dibarengi dengan perumusan dasar hukum dan regulasi yang lebih matang. Terdapat 54 dasar hukum

yang secara spesifik mengatur regulasi jenis-jenis perjudian Makau mulai dari lotre, taruhan olahraga, hingga permainan kasino, bingo, dan poker (Cortés 2025). Selain itu pemerintahan Makau membentuk badan yang bertugas untuk mengawasi praktik judi Makau yaitu Gaming Inspection and Coordination Bureau (DICJ) sebagai badan yang bergerak dan bertugas langsung di bawah pemerintahan Makau. DICJ menjadi pusat pelaporan perusahaan operator judi hingga junket untuk memastikan praktik judi sesuai dengan regulasi yang telah dibuat. Legalisasi judi Makau mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat Tiongkok. Presiden Tiongkok, Xi Jinping, kerap menunjukkan dukungannya kepada Makau dengan kunjungannya ke pusat perjudian pada tahun 2019 (GGR Asia 2025).

Makau juga mulai mengadopsi hukum internasional selaku pembentuk moralitas internasional. Makau mulai mengikuti standar internasional dalam melawan kejahatan berbasis perjudian. Kala itu, upaya pemberantasan Pencucian Uang (ML)/Pendanaan Terorisme (TF)/Pendanaan Proliferasi (PF) Senjata Pemusnah Massal di Makau masih terbatas dan pada dasarnya mengikuti tren internasional di bidang ini. Pada tingkat internasional, upaya pertama untuk menguniversalkan perjuangan melawan pencucian uang dimulai dengan Konvensi PBB tentang Perdagangan Ilegal Narkotika dan Zat Psikotropika Tahun 1988 (Konvensi Wina), yang dalam ayat 1 huruf b) Pasal 3-nya memuat definisi pencucian uang yang bersifat otonom (Carapinha 2023, 12).

Dalam penelitian ini, istilah moralitas internasional didefinisikan secara operasional sebagai seperangkat norma, standar, dan kewajiban hukum global yang menuntut sebuah yurisdiksi untuk mencegah dan memberantas kejahatan finansial

transnasional. Secara spesifik, moralitas internasional dalam kasus ini diwujudkan dalam bentuk kepatuhan Makau terhadap norma anti-pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (CFT) yang diatur dalam 40 Rekomendasi FATF, yang dievaluasi melalui keanggotaannya di Asia Pacific Group on Anti-Money Laundering (APG). Maka dari itu, guna memperkuat landasan hukumnya dan meningkatkan kredibilitas Makau sebagai yuridiksi atau wilayah industri perjudian dengan otonomi tingkat tinggi, Makau secara resmi bergabung dengan Asia Pacific Group on Anti-Money Laundering (APG).

Statusnya sebagai SAR membuat Makau mampu mengadopsi moralitas internasional APG sebagai yuridiksi anggota tanpa harus tergabung dalam delegasi Tiongkok. Bersamaan dengan bergabungnya Makau ke dalam APG, maka Makau juga diwajibkan untuk mengikuti standar internasional yang telah ditetapkan oleh FATF. Hingga tahun 2025, Makau dinilai sangat aktif dalam berpartisipasi dalam APG. Hal ini dicerminkan dengan partisipasi Makau sebagai *co-chair* dalam salah satu agenda yang diadakan oleh APG yaitu *2025 Annual Meeting of the Asia Pacific Group on Anti-Money Laundering (APG)* di Tokyo, Jepang (Government Portal of Macao Special Administrative Region 2025).

Demi menjadi anggota APG, Makau harus mengadopsi 40 rekomendasi FATF. Rekomendasi FATF (Financial Action Task Force) adalah kerangka kerja komprehensif yang dirancang untuk membantu berbagai negara atau yuridiksi dalam mengatasi aliran dana ilegal. Kerangka kerja ini mencakup langkah-langkah yang kuat, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun operasional, yang bertujuan memastikan bahwa otoritas nasional dapat bertindak efektif. Tindakan

efektif tersebut meliputi deteksi dan penghentian aliran dana yang digunakan untuk memicu kejahatan dan terorisme, serta menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas ilegal.

Ke-40 Rekomendasi FATF dibagi menjadi tujuh area atau bidang utama yang berbeda: (1) Kebijakan dan koordinasi AML/CFT (anti pencucian uang/kontra pendanaan terorisme); (2) Pencucian uang dan penyitaan; (3) Pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi; (4) Langkah-langkah pencegahan; (5) Transparansi dan kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) dari badan hukum dan pengaturan; (6) Kewenangan dan tanggung jawab otoritas yang kompeten dan langkah-langkah kelembagaan lainnya; (7) Kerja sama internasional. Dari rekomendasi tersebut, setiap tahunnya FATF akan melakukan evaluasi dan laporan yang dipublikasikan secara publik untuk melihat kinerja sebuah negara atau yuridiksi termasuk Makau. Dalam dokumen tersebut akan memuat rekomendasi lainnya yang dapat dilakukan oleh Makau agar tetap memenuhi standar internasional (Financial Action Task Force, t.t.-b).

Sejak evaluasi bersama terakhir yang dilakukan oleh APG pada tahun 2006, Makau telah melakukan banyak reformasi besar pada sistem Anti-Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme (AML/CFT) mereka. Makau telah menyelesaikan sejumlah penilaian tematik, termasuk pada sektor perjudian (*gaming*), Organisasi Nirlaba (NPO), sistem pengiriman uang alternatif, dan kontrol lintas batas. Pada tahun 2015, Macao berhasil menyelesaikan Penilaian Risiko Nasional (*National Risk Assessment/NRA*) yang pertama. Kala itu, Makau memiliki rencana strategis AML/CFT tahunan yang menjadi panduan kebijakan utama mereka dalam

menangani risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selanjutnya, pada tahun 2016, Makau mengubah semua instrumen penegakan AML/CFT di berbagai sektor—termasuk Lembaga Keuangan (FIs), Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk (DNFBPs), dan sektor-sektor lain untuk menyesuaikan dengan persyaratan penilaian risiko. Melalui semua upaya ini, Makau kini telah mencapai status kepatuhan secara substansial atau kepatuhan tinggi (*largely compliant*) pada 37 dari 40 Rekomendasi FATF. Makau juga telah menyiapkan amandemen untuk undang-undang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan mengusulkan pembentukan sistem deklarasi lintas batas yang baru (The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) 2017) Kepatuhan ini kemudian ditingkatkan oleh Makau pada Laporan Tindak Lanjut MER pada tahun 2019. Makau secara resmi mematuhi 40 Rekomendasi FATF (Asia Pacific Group on Anti Money Laundering (APG) 2019).

Dukungan yang diterima oleh Makau, komitmennya, serta keaktifannya dalam mengadopsi standar internasional dalam legalisasi perjudian guna mempertahankan judinya membuat industri judi di daerah tersebut berkembang pesat terutama dengan menarik tamu VIP. Sebesar 60% pendapatan dari perjudian Makau didapat dari tamu VIP yang ditarik oleh junket pada tahun 2014 dengan 235 junket terdaftar (Yogonet Gaming News 2025a). Junket bisa berupa perorangan atau perusahaan yang bertugas untuk menarik calon penjudi dari luar Makau yang kemudian diwajibkan untuk diawasi dan melapor kepada DICJ. Pelanggan yang menggunakan jasa junket akan disediakan fasilitas kendaraan, hiburan, pinjaman dan akomodasi lainnya saat bermain judi di Makau. Namun, di saat yang bersamaan

junket tidak hanya menjadi jembatan penghasilan industri ini tetapi juga aktor utama permasalahan di balik industri perjudian termasuk tindak pencucian uang dan kejahatan terorganisir.

Para penjudi menemukan kemudahan untuk menyetor dana ke junket di Tiongkok daratan dan mengaksesnya di Makau. Hasil dari kemenangan permainan judi tersebut kemudian disetor dalam bentuk dollar Hong Kong (HKD) atau dollar Amerika Serikat (USD) di rekening yang berbeda. Hal ini memperbesar kesempatan untuk terjadinya pencucian uang lewat praktik judi. Komisi Eksekutif Kongres Amerika Serikat tentang Tiongkok (CECC) mengeluarkan pernyataan bahwa perkembangan judi Makau dibarengi dengan praktik korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir (Pemberton 2020, 11–12). Akibatnya, Tiongkok merilis data bahwa paling tidak terdapat 202 miliar USD dana ilegal yang dipindahkan ke Makau termasuk ke dalam kasinonya. Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) menyatakan bahwa tidak ada cukup penelitian mengenai junket yang membuat pergerakan junket tidak dapat diawasi dengan baik. Puncaknya, di tahun-tahun terakhir, junket yang terdaftar secara resmi mengalami penurunan ketika peraturan mengenai pencucian uang diberlakukan (Financial Crime Academy 2025). Hingga Mei 2025, hanya terdaftar 29 junket yang beroperasi di Makau. Angka ini jauh di bawah batas lisensi di Makau yaitu sebanyak 50 junket (Yogonet Gaming News 2025b).

Alvin Chau, salah satu pemimpin operator junket di Makau dan pendiri Suncity Group, ditangkap atas tuduhan perjudian ilegal sebesar 823,7 miliar HKD. Suncity Group merupakan perusahaan operator terbesar yang menggaet warga

negara Tiongkok daratan untuk berjudi di Makau. Jaksa menuduh Chau memimpin dan mendirikan sindikat kriminal yang mendukung taruhan yang tidak dilaporkan tetapi menyatakan Chau bebas dari tuduhan pencucian uang (News Agencies 2023). Akibatnya, pemerintah kehilangan lebih dari 8,26 miliar HKD dari pendapatan pajak (Tsoi 2023). Setelah penangkapannya, Suncity menutup semua kamar VIP-nya. Penangkapan ini membuktikan kritik yang disampaikan pada tahun 2014 oleh direktur dari serikat pekerja Amerika Serikat, Serikat Pekerja Teknik Operasional Internasional, yang mengungkapkan bahwa DICJ gagal dalam mengawasi junket dan melabeli perusahaan operator sebagai perusahaan yang ‘layak’ (Pemberton 2020, 9). Tak hanya itu, Departemen Luar Negeri AS mencap Makau sebagai pusat pencucian uang dunia yang memfasilitasi junket dalam tindak ilegalnya (Macau Daily Times 澳門每日時報 2016).

Tidak hanya tindak pencucian uang yang luput dari perhatian DICJ tetapi juga praktik kejahatan terorganisir (Pemberton 2020, 9). Faktanya salah satu perusahaan judi, Wynn Makau, memiliki jaringan dengan kelompok anggota Triad 14K yang pernah ditangkap sebelumnya (Fraser 2014). Pasalnya, perusahaan operator akan mendapatkan kesulitan dalam mencari pelanggan VIP jika tidak memiliki jaringan dengan kelompok triad. Hal ini disebabkan karena kelompok triad menganggap pelanggan VIP adalah teritori ekonomi mereka (Lo dan Kwok 2016, 16–17).

Banyak anggota triad terlibat dalam jalannya industri judi di Makau dan merupakan *damazai* (sekarang berkembang menjadi junket). Mereka bertugas dalam menyebarkan chip mati atau *dead chip* di ruang VIP. Chip mati adalah chip

yang tidak bisa diuangkan kembali, berbeda dengan chip reguler yang dijual di kasino. *Damazai* akan membeli chip mati dari kasino dengan harga yang lebih murah yang kemudian akan dijual kepada pelanggan VIP. Setelah itu, pelanggan VIP akan bermain judi dengan chip mati tersebut dan mendapatkan dua kemungkinan, memenangkan chip reguler atau kalah dan kehilangan chip mati. Jika pelanggan VIP memenangkan chip reguler, *damazai* akan dengan cara halus menukar chip reguler dengan chip mati yang masih mereka miliki dengan metode ‘pertemanan’ (Lo dan Kwok 2016, 3–4). Metode ini memungkinkan para penjudi untuk terus berjudi karena tidak bisa menukar chip mati yang mereka miliki dengan uang.

Tetapi seiring dengan semakin ketatnya kebijakan Presiden Xi Jinping terkait Undang-Undang Anti Korupsi dan larangan judi bagi warga negara Tiongkok serta keterpurukan pasca pandemi Covid-19, junket Makau sedikit demi sedikit mulai kesulitan menemukan tamu VIP dari Tiongkok daratan. Tekanan ini yang akhirnya memaksa junket Makau untuk mengekspansi targetnya ke Filipina, Korea Selatan, Laos, Kamboja, Saipan, Vanuatu, dan Vietnam (Pemberton 2020, 16). Perusahaan judi Makau banyak melakukan kerjasama dengan junket untuk menarik turis internasional kembali mengisi meja kasino.

Selain itu, jauh sebelum itu pada tahun 1999, Han Kwok Koi atau yang lebih dikenal sebagai “*Broken Tooth*” merupakan salah satu gembong mafia besar Makau dan merupakan kepala Triad 14K yang dekat dengan kasino Makau, ditangkap setelah melakukan praktik pencucian uang, lintah darat, dan keanggotaannya dalam geng kejahatan. Koi melancarkan aksi kejahatan terhadap kelompok triad lainnya

dalam merebutkan kekuasaan terhadap kasino di Makau sebulan sebelum dikembalikan ke Beijing (VOA 2012). Tetapi yang menjadi perhatian adalah Koi memiliki paling tidak tiga perusahaan yang dikendalikan olehnya termasuk World Hongmen History and Culture Association (Kamboja), Dongmei Group (Hong Kong), dan Palau China Hung-Mun Cultural Association (Palau). Perusahaan-perusahaan tersebut terutama Hongmen History and Culture Association digunakan oleh Triad 14K untuk melegitimasi kegiatannya (U.S. Department of the Treasury 2025).

Lewat proyek Belt Road Initiative (BRI), Broken Tooth dapat melakukan tindakan kejahatan dengan kedok kepentingan proyek, Beijing, atau Partai Komunis Cina (PKC). Hingga saat ini, Broken Tooth melalui perusahaan-perusahaan ini berhasil merekrut tokoh-tokoh elit di Malaysia dan Kamboja serta telah meluaskan koneksinya di Asia Tenggara (U.S. Department of the Treasury 2025). Hal tersebut menguatkan tuduhan bahwa praktik judi di Makau bisa menjadi sarang praktik kejahatan yang dilakukan oleh turis melalui koneksinya dengan geng kejahatan yang punya hubungan dekat dengan kasino di Makau.

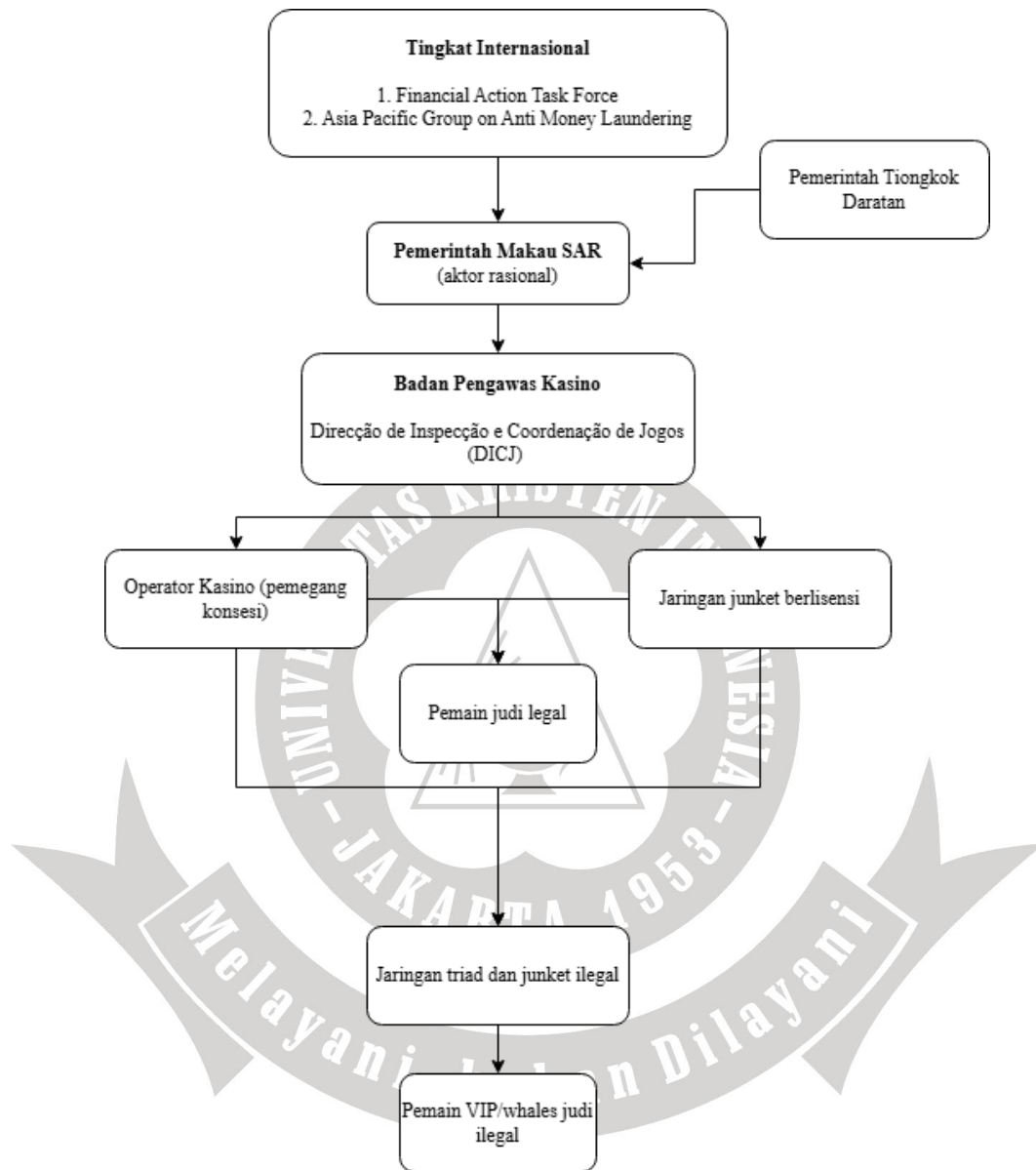
Ini menjadi awal dari masalah yang lebih luas terlebih tidak ada banyak berita yang menyorot praktik pencucian uang dan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh turis yang difasilitasi oleh junket di Makau. Kebanyakan media dan pemerintah menyorot dan menindaklanjuti tindak pencucian uang dan kejahatan terorganisir yang merugikan dan melibatkan warga negara Tiongkok seperti Alvin Chau. Bahkan setelah Makau berkomitmen dan tergabung dalam APG, tindak kriminal yang dilakukan oleh turis cenderung tidak terdeteksi atau bahkan tidak

menjadi perhatian utama bagi pemerintah Makau. Fakta ini menjadi dasar anggapan bahwa partisipasi Makau dalam APG sebenarnya tidak berarti banyak bahkan membuka kemungkinan bahwa Makau memanfaatkan partisipasinya tersebut hanya sebagai topeng untuk melindungi kejahatan dalam kerangka perjudian.

Anggapan ini didukung dengan pendapat Pontell, dkk (2014) menyatakan bahwa DICJ mengalami kegagalan mengawasi junket yang memiliki jaringan ke luar negeri. Penelitian ini hanya menegaskan bahwa pencucian uang yang dilakukan oleh junket merupakan uang hasil korupsi, *ebazzelement*, dan penyuapan yang bersumber dari Tiongkok daratan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai tindak kriminal yang dilakukan oleh turis yang menjadi bukti kuat bahwa isu ini tidak banyak diperbincangkan dan menjadi perhatian sehingga memperkuat tuduhan mengenai partisipasi Makau hanya menjadi kedok di mata internasional.

Maka dari itu, secara singkat, Makau berpartisipasi dalam moralitas internasional yaitu menaati 40 rekomendasi FATF melalui keanggotaannya dalam APG sekaligus berada di bawah Tiongkok. Dengan menaati aturan main APG, Makau memiliki lembaga pengawas yang disebut DICJ yang mengawasi operator perjudian dan junket legal untuk menarik turis. Tetapi perlu dipahami, ternyata Makau masih memiliki resiko besar dalam pencucian uang terutama dalam kerangka perjudian sehingga membuat perjudian tak hanya didukung oleh pemegang konsensi atau junket legal tetapi juga anggota triad yang menjadi junket ilegal. Hal ini dilakukan untuk menarik turis atau *whales* yang akan berjudi dengan jumlah uang sangat banyak meskipun akhirnya transaksi dalam perjudian tersebut adalah proses pencucian uang (Bagan 1.1).

Bagan 1.1 Ringkasan Alur Aktor dalam Perjudian Makau



Sumber: Diolah Peneliti (Shalum 2026)

Judi pada akhirnya tak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga arena bebas bagi tindakan kriminal seperti pencucian uang, penipuan, pemerasan bagi masyarakat global terutam penjudi VIP dan *whales*. Maka dari itu penelitian ini membahas tentang judi Makau sebagai arena pencucian uang dan kejahatan

terorganisir turis internasional yang difasilitasi junket ilegal yang lolos akibat *selective enforcement* pemerintahnya sendiri dan menjadikan partisipasinya dalam APG sebagai wadah untuk mempertahankan rasionalitasnya sendiri dengan menggunakan konsep ekonomi bayangan, teori pilihan rasional dan legalisasi. Hasil temuannya menjadi penting untuk keberlanjutan riset mengenai junket judi untuk mencegah terjadinya pencucian uang dan bagian dari tindak kejahatan terorganisir dalam kerangka judi Makau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun dapat dilihat bahwa pemerintah Makau tidak banyak menaruh perhatian terhadap tindakan kriminal seperti pencucian uang dan kejahatan terorganisir yang melibatkan pelaku turis internasional. Kendati demikian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana rasionalitas kebijakan Makau dalam menyikapi konflik antara rasionalitas pasar dan moralitas internasional, melalui partisipasinya dalam rezim legalisasi internasional Asia Pacific Group on Anti-Money Laundering (APG)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan perjudian Makau sebagai sumber aliran *black money* melalui praktik permainan judi yang dilakukan oleh turis internasional; dan (2) menjelaskan rasionalitas Makau dalam kampanye anti pencucian uang sebagai manifestasi *selective enforcement* pada aliran *black money* (rasionalitas pasar) dengan memanfaatkan keanggotaan Asia Pacific Group

on Anti Money Laundering (moralitas internasional), yang melahirkan sebuah paradoks kebijakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian hubungan internasional mengenai pemanfaatan legalisasi melalui partisipasi forum APG untuk mempertahankan rasionalitas Makau dalam industry perjudian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan empat sasaran: (1) Memberikan masukan kepada pemerintah terkait kejahatan yang berbasis judi yang dilakukan oleh turis dan bentuk-bentuknya; (2) Memberikan masukan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait cara penanganan dan mengidentifikasi tindak kriminal yang melibatkan masyarakat Indonesia melalui perjudian asing; (3) Memberikan kesadaran kepada masyarakat Indonesia mengenai kejahatan melalui perjudian dan cara menghindarinya; (4) Menjadi rujukan kepada akademisi/peneliti mengenai kejahatan melalui perjudian Makau atau topik yang relevan.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal TA ini terdiri atas empat bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah/pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang berdirinya perjudian Makau yang akhirnya menjadi sarang tindak kriminal pencucian uang dan kejahatan terorganisir.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan tentang literatur terdahulu yang membahas mengenai topik serupa dan memuat metode penelitian mendeskripsikan tahapan dalam penelitian yang akan dilakukan.

BAB III MAKAU SEBAGAI IBU KOTA JUDI DUNIA DAN REZIM PENGAWASAN PERMAINAN JUDI

Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai sejarah mengenai awal dari pembentukan wilayah administrasi khusus Makau dan sistem tata kelola wilayah administrasi khusus yang dianut oleh Makau. Selain itu bab ini juga membahas mengenai awal bagaimana Makau bisa menjadi ibu kota perjudian dunia dan salah satu pemimpin dalam industri perjudian. Di bab yang sama, akan dijelaskan mengenai kerangka peraturan dan implementasi pengawasan permainan judi di Makau mulai dari tingkat konstitusi hingga ke tingkat paling rendah yaitu pada tingkat junket.

BAB IV LEGALISASI ASIA PACIFIC GROUP ON ANTI MONEY LAUNDERING DAN RASIONALITAS MAKAU

Bab ini berisi mengenai sub-bab yang akan membahas mengenai moralitas internasional yang harus ditaati oleh Makau sebagai salah satu tujuan berjudi terbesar di dunia. Bab ini akan membahas sistem APG, bentuk keanggotaan, kerjasama, hingga implementasi yang seharusnya dicapai sebagai anggota APG. Bab ini berisi sub-bab mengenai alasan mengapa Makau menjadikan legalisasi dalam forum APG dengan memanfaatkan bentuk legalisasinya untuk menutupi aksinya untuk mempertahankan rasionalitas pasarnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait kebijakan pemerintah Makau guna mendeteksi tindak kriminal oleh turis internasional lewat judi Makau.